

Tidak Meratanya Persebaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berpengaruh pada Konflik di Wilayah Papua

Rizqi Nurul Azizah¹, Syifa Aulia Ramadhani²

¹Faculty of Mandarin Linguistik, University Sebelas Maret ²Faculty of Mandarin Linguistik, University Sebelas Maret

Corresponding author's email:

¹rizqiazizah7_07@student.uns.ac.id, ²syifaaulia24@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini dibuat untuk menganalisis tingkat pemahaman orang di wilayah Papua terkait banyaknya konflik yang terjadi. Pendidikan yang tidak tersebar secara merata sehingga tingkat angka melek huruf yang sangat rendah di wilayah Papua. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui persebaran pendidikan kewarganegaraan di wilayah Papua. Dengan adanya artikel ini kita dapat mengetahui seberapa pengaruh pemerataan pendidikan di Indonesia ini khususnya pendidikan kewarganegaraan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak meratanya persebaran pendidikan dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai akan dibahas lanjut pada makalah ini. Diharapkan dengan adanya perbandingan jumlah konflik yang terjadi dari tahun ke tahun kita dapat mengetahui penyebab dan hubungan yang berkaitan dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di suatu wilayah khususnya papua. Mengingat bahwa saat ini persebaran pendidikan di Indonesia tidak merata. Jadi bagaimana apabila pemerataan pendidikan, pendidikan kewarganegaraan terdistribusi dan terealisasi, akankah hal tersebut merubah sikap masyarakat yang masih kedaerahan menjadi kekeluargaan.

Kata kunci: pemerataan, pendidikan, konflik

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti tidak akan lepas dari adanya konflik. Entah itu konflik kecil ataupun konflik besar yang mengakibatkan adanya perseteruan. Konflik bisa saja menjadi ancaman bagi suatu negara apabila tidak segera ditangani. Menurut Soerjono Soekanto (2006) konflik adalah pertentangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Konflik biasanya terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara masyarakat satu dan yang lain.

Seperti halnya pada masyarakat Papua yang sampai saat ini terus terjadi konflik antar suku. Sering kita dengar Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memicu konflik

antar suku tersebut. Gerakan separatis ini terjadi karena adanya suatu organisasi yang menghasut masyarakat Papua agar mau mengikuti mereka untuk membebaskan Papua dari Indonesia. Adanya konflik masa lalu yang belum benar-benar terselesaikan serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat terpencil dan pendidikan masyarakat di pelosok yang masih kurang juga menyebabkan masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan terhasut oleh gerakan separatis yang ada.

Pendidikan yang kurang menjangkau masyarakat di pelosok juga menyebabkan ketidakmerataan persebaran pendidikan yang didapat oleh masyarakat. Pendidikan adalah hal yang penting bagi suatu negara mengingat maju tidaknya suatu negara tergantung pada kualitas pendidikan dari suatu negara. Apabila kualitas pendidikan suatu negara terstruktur dengan baik maka kualitas pendidikan di suatu negara akan baik juga. Hal itu juga berkaitan tentang persebaran pendidikan dari suatu negara. Mungkin tidak jika suatu negara dengan kualitas pendidikan terbaik persebaran pendidikannya tidak merata? Mungkin. Akan tetapi fenomena tersebut sangat jarang dijumpai

Adapun pendidikan kewarganeraan saat ini keberadaannya seperti diremehkan. Ada yang menganggap tidak penting, ada yang menganggap tidak berguna. Prasangka hal kecil inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan berkewarganeraan yang baik. Adapun pendidikan kewarganeraan sendiri berperan sangat penting bagi suatu negara khususnya Indonesia. Karena didalam pendidikan kewarganeraan sendiri inilah kita diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa. Perlunya pemerataan pendidikan khususnya pendidikan kewarganeraan ini tentu dapat mengurangi konflik-konflik sosial yang terjadi.

Mirisnya keberadaan pemerataan pendidikan ini tentu menjadi pusat perhatian bagi pemerintahan itu sendiri. Mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Pendidikan sangatlah penting negara Indonesia khususnya pendidikan kewarganeraan yang mana pendidikan kewarganeraan ini menjadi tolak ukur bangsa dan masyarakat dalam menjunjung nilai serta moral bangsa Indonesia. Hal ini terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam menentukan dan etika bersikap berbangsa dan bernegara agar terjalannya keutuhan suatu bangsa. Memang tidak bisa dipungkiri akan muncul pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa akan sulit mempengaruhi Indonesia apabila masyarakat berpegang teguh terhadap Pancasila dan mempelajari pendidikan kewarganeraan yang baik dan benar. Oleh karena itu ,pendidikan kewarganeraan sangat penting bagi warga negara khususnya Indonesia

2. Pentingnya pemerataan dan adanya pendidikan kewarganegaraan

Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

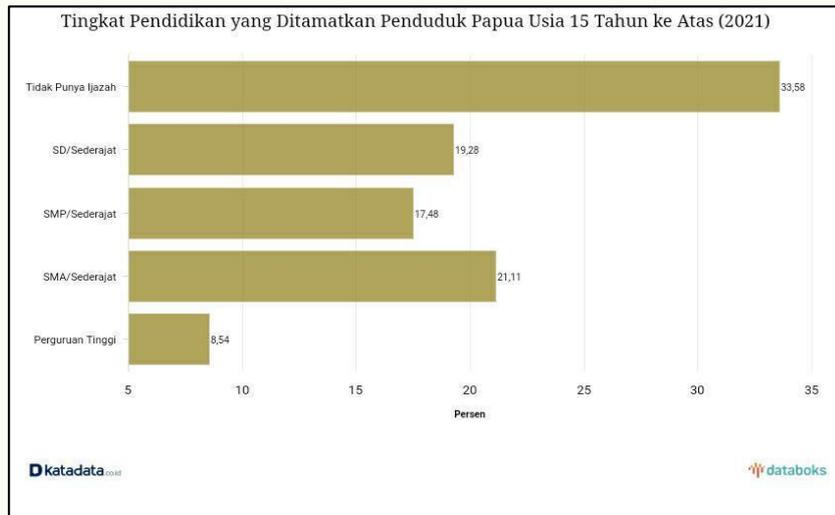
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengambil sikap dan mengenai moral dan nilai moral dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tujuan adanya pendidikan kewarganegaraan yaitu :

1. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai moral Pancasila secara personal dan sosial.
2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD 1945.
3. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki sikap kebangsaan, dan cinta tanah air.
4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai anggota masyarakat dan warga negara.
5. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terdapat nilai-nilai dasar berkeadilan dan berkeadilan yang tentu menjadi dasar konsep warga global. Warga negara global, hal tersebut tentu tercantum dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan.

3. Persebaran Pendidikan dan hubungannya dengan konflik

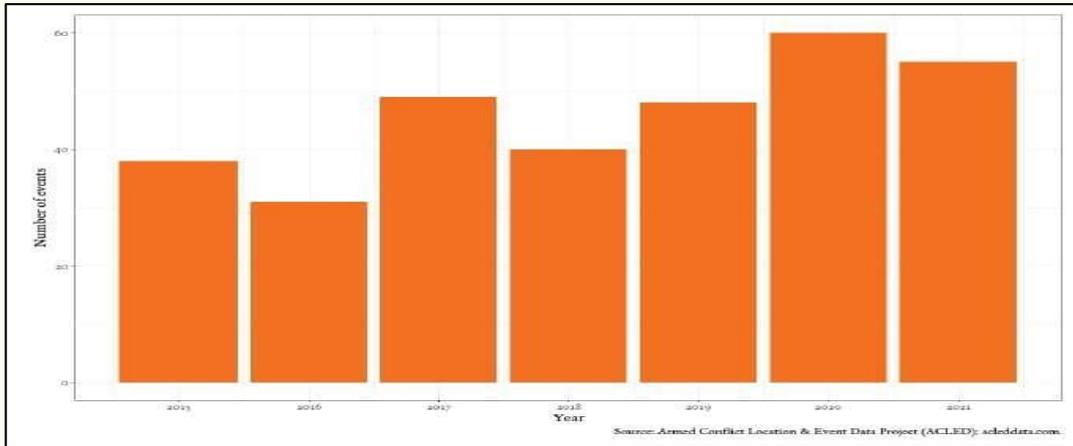
Dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan yang terjadi di Papua masih rendah. Hal itu merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, terdapat penduduk Papua usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah. Persentasenya mencapai 33,58% pada 2021. Sementara, sebanyak 19,28% penduduk Papua usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikannya pada jenjang sekolah dasar (SD). Sebanyak 17,48% memiliki ijazah setara sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian, sebanyak 21,11% penduduk Papua usia 15 tahun ke atas memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA). Ada pula tingkat pendidikan penduduk Papua usia 15 tahun ke atas hingga perguruan tinggi (PT).

Tabel 1.1 diagram batang tingkat pendidikan di wilayah Papua usia 15 tahun ke atas.



Dari grafik tersebut bisa disimpulkan bahwa lebih dari 30% jumlah penduduk di Papua tidak memiliki ijazah. Adapun persebaran pendidikan di wilayah Papua termasuk menjadi daerah yang tertinggal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1.) sosial masyarakat sosial ekonomi masyarakat yang tingkatannya masih rendah 2.) persepsi masyarakat tentang pendidikan formal yang kurang baik akibatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang 3.) kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak 4.) melanjutkan sekolah masih rendah 5.) kurangnya interaksi antara masyarakat lokal dengan pemerintah.

gambar grafik batang 1.2 dari tahun 2020-2022.



Grafik tersebut merupakan grafik kekerasan terhadap rakyat sipil di Papua. Provinsi paling timur di Indonesia ini adalah wilayah yang terus mengalami konflik konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang signifikan. Adapun demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi kesimpulan riset Made Supriatna faktor utama dari tabel tersebut adalah rasisme terhadap orang asli Papua. Hal-hal yang dianggap sepele inilah yang menyebabkan konflik dan rasa etnosentrisme yang membuat masalah menjadi berlarut-larut. Dapat dilihat juga bahwa konflik disini juga membutuhkan penerapan tentang pendidikan kewarganegaraan. Dengan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menanggulangi dan mengurangi konflik yang ada.

Tabel 1. 2 BPS : Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal 2020-2022

Daerah Tempat Tinggal	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal								
	SD / Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Perkotaan	0,31	0,34	0,45	5,83	5,29	5,60	18,11	17,27	18,75
Pedesaan	0,98	1,04	1,06	9,02	8,62	8,68	27,81	27,22	27,60

Adapun persebaran pendidikan di Indonesia masih tidak merata. Hal itu disebabkan karena 1.) akses menuju sekolah masih kurang 2.) Kurangnya kehadiran tenaga pengajar yang berkualitas pada jenjang pendidikan.3.) Rendahnya tingkat keamanan dari konflik dan perang antar suku pedalaman. 4.) Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk mendukung kompetensi guru lokal. 5.) Kurangnya bangunan sekolah dan infrastruktur yang kurang memadai. 6.) Tidak heran jika anak-anak disana banyak sekali yang putus sekolah dan buta huruf karena mereka berpikir yang terpenting adalah bagaimana agar bisa bertahan hidup dan masih mempunyai tempat tinggal.

Bisa dilihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun cenderung naik turun kekerasan ini terjadi akibat kurang rasa toleransi dan menghargai antar suku sehingga masyarakat sipil dan aparat pemerintah pun terkena dan menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka ini. Hilangnya rasa kemanusiaan, rasa peduli antar sesama, hak asasi manusia yang tertindas ini merupakan hal yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri juga mereka melakukan semua itu bukanlah tanpa sebab. Hal itu terjadi karena kurang memadainya akses, pelayanan umum, harga bahan pokok yang sangat tinggi yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk mempercayai pemerintah sehingga membuat kelompok atau organisasi yang menentang pemerintahan dan ingin merdeka .

Berkurangnya pemahaman dan penyaluran tentang pendidikan kewarganeraan di wilayah Papua ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan antar suku ini. Mengapa? Karena apabila masyarakat Papua mengerti dan memahami tentang pendidikan kewarganeraan, tentu mereka akan tahu bagaimana berperilaku yang baik antar suku, rasa kemanusiaan, keberagaman tidak membuat mereka untuk mengagungkan sukunya sendiri, menghargai pendapat serta menerima perbedaan. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganeraan sendiri dapat terealisasi, maka perpecahan dan konflik yang terjadi tidak akan banyak dan meningkat.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini merupakan salah satu contoh dari kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani kasus-kasus separatis yang ada di Indonesia. Pemerintah kurang cepat dan tegas dalam menangani kasus gerakan separatis ini. Pemerintah juga

tidak bisa cepat mendapatkan solusi atas masalah gerakan separatis yang masih berlangsung di Papua ini

Kurangnya infrastruktur dalam bidang pendidikan juga turut andil dalam penyebab adanya gerakan separatis yang terjadi di Papua. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan pendidikan yang layak untuk belajar, terlebih lagi mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Yang mana Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting karena berisi dasar-dasar nilai-nilai moral dan tingkah laku dan pedoman dalam berkehidupan.

Kurangnya mendapatkan pendidikan kewarganegaraan bisa saja membuat masyarakat jadi mudah terhasut oleh asas-asas yang sangat bertolak belakang dengan asas Pancasila. Seperti pada kasus adanya gerakan Organisasi Papua Merdeka yang sudah terjadi sejak lama di Papua, masyarakatnya yang mudah terhasut untuk ikut dalam organisasi separatis tersebut menandakan bahwa masih kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. Hal tersebut juga menandakan bahwa masih kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang ada di tanah Papua.

4. **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kami bahwa tingkat pendidikan di wilayah Papua masih sangat rendah. Bahkan, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi saja kurang dari 10 persen. Ketidakmerataan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan inilah yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menghargai pendapat antar suku, rasa egois, dan kurangnya rasa kekerabatan. Yang semua itu terdapat pada nilai-nilai moral pendidikan kewarganegaraan apabila bisa diaplikasikan dan terealisasikan. Oleh karena itu, pemerintah dan warga negara turut serta untuk memajukan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat bisa lebih menghargai perbedaan pendapat dan suku yang sangat beragam ini. Adapun cara yang dilakukan bisa dengan mempercepat pembangunan akses pendidikan di wilayah terpencil dan memberikan pemahaman dengan pemahaman yang baik dan benar.

Penghargaan (Fakultatif)

Artikel ini telah diuji oleh dosen pengajar kami Bpk. Riska Andi Fitriono, S. H., M. H.

Referensi

Jurnal

Pradana, R. Joko, S. (2021) Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar

Sutrisno, (2018) PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA GLOBAL

Artikel Koran:

Pamungkas, P. (2021, Februari 16), Organisasi Papua Merdeka (OPM)

TribunnNews <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2021/02/16/organisasi-papua-merdeka-opm>

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional 1,78%, Papua Masih

21,9. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1389>

Peneliti Kekejaman Massal Kemungkinan Terjadi di Tanah

Papua.25/07/2022. <https://jubi.id/headline/2022/menurut-peneliti-kekejaman-massal-kemungkinan-terjadi-di-tanah-papua/amp/>

BPS.Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2020-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>